

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
TAHUN BUKU 2023
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**

Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 ("**Rapat**") dengan perincian informasi sebagai berikut:

A. Hari/Tanggal, Waktu, dan Tempat Pelaksanaan Rapat

Hari / Tanggal : Rabu / 06 Maret 2024
Waktu : Pukul 14.31 WIB s.d. 17.13 WIB
Tempat : Menara Bank BTN Jalan Gajah Mada No.1, Jakarta Pusat – 10130

B. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit Perseroan yang hadir dalam Rapat

Rapat dipimpin oleh Sdr. Chandra M. Hamzah, selaku Komisaris Utama/Independen, sesuai keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 21 Februari 2024 yang disampaikan melalui Surat Dewan Komisaris Perseroan Nomor 27/KOM/BTN/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 perihal Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen : Sdr. Chandra M. Hamzah
Wakil Komisaris Utama/Independen : Sdr. Iqbal Latanro
Komisaris Independen : Sdr. Armand B. Arief
Komisaris Independen : Sdr. Sentot A. Sentausa
Komisaris : Sdr. Andin Hadiyanto
Komisaris : Sdr. Herry Trisaputra Zuna
Komisaris : Sdr. Himawan Arief Sugoto

Direksi

Direktur Utama : Sdr. Nixon L.P. Napitupulu
Wakil Direktur Utama : Sdr. Oni Febriarto Rahardjo
Direktur IT and Digital : Sdr. Andi Nirwoto
Direktur Assets Management : Sdri. Elisabeth Novie Riswanti
Direktur Distribution and Funding : Sdr. Jasmin
Direktur Risk Management : Sdr. Setiyo Wibowo
Direktur Consumer : Sdr. Hirwandi Gafar
Direktur Finance : Sdr. Nofry Rony Poetra

Direktur Human Capital, Compliance, and Legal : Sdr. Eko Waluyo
Direktur Institutional Banking : Sdr. Hakim Putratama

Komite Audit

Ketua merangkap Anggota : Sdr. Iqbal Latanro
Anggota : Sdr. Sentot A. Sentausa
Anggota : Sdr. Andin Hadiyanto
Anggota : Sdr. Endang A. Suprijatna
Anggota : Sdr. Peter Eko Budi Darwito

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham termasuk di dalamnya saham Seri A Dwiwarna yang seluruhnya mewakili 11.192.526.051 (sebelas miliar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu lima puluh satu) saham atau sebesar 79,7504035% (tujuh puluh sembilan koma tujuh lima nol empat nol tiga lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 14.034.444.413 (empat belas miliar tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga belas) saham yang terdiri dari:

- 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna; dan
- 14.034.444.412 (empat belas miliar tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus dua belas) saham seri B;

dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan, Pendapat, dan/atau Usul.

Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, kecuali mata acara kelima karena bersifat laporan, telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, dan/atau usul.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan perhitungan suara, yang disetujui oleh Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah dengan ketentuan:

- Mata acara Rapat pertama sampai dengan keempat, keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- Mata acara Rapat kelima, hanya bersifat laporan sehingga tidak terdapat keputusan.
- Mata acara Rapat keenam, keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham Yang Berhak lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- d. Untuk mata acara Rapat ketujuh, keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham Yang Berhak lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

F. Pihak Independen Penghitung Suara

Hasil pemungutan suara dihitung oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek (“BAE”) dan selanjutnya divalidasi dan diumumkan oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., yang keduanya merupakan pihak yang independen yang ditunjuk oleh Perseroan.

G. Keputusan Rapat

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK TABUNGAN NEGARA Tbk atau disingkat PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk Nomor 06 tanggal 6 Maret 2024, yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., yang pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Mata Acara Pertama Rapat**

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023 sekaligus Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2023.

Pertanyaan, Pendapat, dan /atau Usul

Terdapat 4 (empat) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, pendapat, dan/atau usul sehubungan dengan mata acara pertama Rapat. Rangkuman dan intisari proses tanya jawab untuk mata acara tersebut adalah sebagai berikut:

| No | Tanggapan/Pertanyaan | Jawaban |
|----|---|--|
| 1. | <p>Dalam rangka pelaksanaan pembinaan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk/“BTN” untuk peningkatan kinerja Perseroan, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>1. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada segenap jajaran Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai BTN atas:</p> <p>a. Keberhasilan dalam meningkatkan kinerja Perseroan, yang tercermin pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Laba bersih meningkat 14,97% YoY menjadi Rp3,50 triliun. 2) Total Kredit meningkat 11,87% YoY menjadi Rp333,69 triliun. 3) Realisasi <i>Fee Based Income</i> meningkat 60,15% YoY menjadi 3,22 triliun. 4) Rasio CASA meningkat dari 48,52% menjadi 53,73%. 5) Rasio CIR turun dari 46,66% menjadi 45,26%. | <p>Terima kasih Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atas tanggapannya. Perseroan akan mencatat dan menindaklanjuti catatan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.</p> |

| No | Tanggapan/Pertanyaan | Jawaban |
|----|--|---------|
| | <p>6) Rasio NPL Gross menurun dari 3,38% menjadi 3,01% dan LAR menurun dari 23,24% menjadi 21,20%.</p> <p>b. Komitmen Perseroan dalam mendukung program pemerintah untuk memaksimalkan penyediaan pembiayaan rumah rakyat khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka mencapai <i>zero backlog</i> pada tahun 2045. Kami berharap capaian tersebut terus ditingkatkan pada masa mendatang sehingga Perseroan dapat berkontribusi lebih optimal bukan hanya terhadap <i>shareholder return</i> namun juga negara dan masyarakat.</p> <p>2. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris dan Direksi BTN untuk perbaikan kinerja di masa mendatang, sebagai berikut:</p> <p>a. Untuk mengantisipasi kondisi ekonomi global pada tahun 2024 yang berpotensi adanya tekanan inflasi dan pengetatan kebijakan moneter global dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, Perseroan agar menetapkan strategi penyaluran kredit yang lebih selektif, menerapkan manajemen risiko kredit yang berkesinambungan, serta pengelolaan likuiditas yang optimal;</p> <p>b. Secara nasional, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 diprediksi akan tetap kuat dan tumbuh positif dalam kisaran 4,8% - 5,2%. Selain itu, sektor perumahan masih memiliki ruang tumbuh yang sangat besar mengingat masih tingginya angka <i>backlog</i> perumahan nasional, tingginya jumlah masyarakat yang belum memiliki rumah yang layak, dan perpanjangan stimulus yang diberikan Pemerintah pada sektor perumahan. Peluang ini agar dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Perseroan dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada sehingga dapat menjadi <i>The Best Mortgage Bank in Southeast Asia</i> sebagaimana yang diharapkan;</p> <p>c. Perseroan agar berfokus pada penguatan strategi, inovasi bisnis, serta ekspansi pasar untuk meningkatkan kapitalisasi pasar sehingga dapat memberikan nilai tambah kepada Pemegang Saham;</p> <p>d. Mengingat pada tahun 2023 terjadi penurunan <i>net interest income</i>, Perseroan diharapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan upaya penurunan <i>cost of fund</i> melalui peningkatan dana murah (CASA), penguatan bisnis berbasis ekosistem, penetrasi <i>mobile banking</i> sebagai <i>digital financial solution</i>, serta mengoptimalkan penetrasi <i>cash management service</i> bagi nasabah, sehingga dapat unggul dalam persaingan <i>transaction banking service</i>. 2) Mendorong ekosistem perumahan rumah dengan KPR model baru, ekspansi bisnis | |

| No | Tanggapan/Pertanyaan | Jawaban |
|----|--|--|
| | <p>lainnya yang berkualitas dan berkelanjutan, serta mengoptimalkan <i>yield</i> atas penyaluran kredit dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian sehingga terdapat peningkatan profitabilitas yang berkesinambungan.</p> <p>e. Terus mendorong peningkatan kontribusi pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Operasional Lainnya khususnya <i>Fee Based Income</i> (FBI) melalui akselerasi layanan keuangan <i>digital</i> dan <i>transactional banking</i> yang masif, terutama pada <i>user internet</i> dan <i>mobile banking</i>, serta pengembangan <i>fee based</i> dari sumber-sumber baru lainnya seperti layanan valas, <i>trading forex</i>, dan <i>structured products</i>;</p> <p>f. Memastikan pencapaian target KPI Penyertaan Modal Negara (PMN), terutama pada indikator-indikator yang tidak tercapai pada tahun 2023 yaitu BOPO, NPL Gross dan Realisasi KPR Subsidi;</p> <p>g. Sehubungan dengan semakin tingginya peran teknologi informasi dalam industri perbankan dan semakin masifnya upaya peretasan dan gangguan keamanan siber yang berdampak sangat masif baik secara operasi, keuangan, maupun reputasi, Perseroan diharapkan memperkuat keamanan sibernya (<i>cyber security</i>) baik dari aspek kebijakan, infrastruktur, sistem operasi, maupun mitigasi risiko;</p> <p>h. Dalam rangka mendorong prinsip keuangan berkelanjutan, Perseroan agar menjaga komitmen dalam mengembangkan inisiatif ESG antara lain melalui program kerja Perseroan, penyaluran kredit maupun penerbitan surat utang dengan berlandaskan pada prinsip <i>green financing</i>. Selain itu, implementasi inisiatif ESG agar diselaraskan dengan arah fokus program pemerintah dalam rangka pemulihan dan pengembangan ekonomi nasional;</p> <p>i. Perseroan agar terus berkomitmen melakukan perbaikan dalam implementasi Strategi Anti Fraud pada setiap pilarnya dan tidak memberikan toleransi (<i>zero tolerance</i>) pada setiap bentuk <i>fraud</i> baik internal maupun eksternal;</p> <p>j. Menindaklanjuti temuan audit/pemeriksa internal maupun eksternal, mengoptimalkan pengelolaan manajemen risiko dan implementasi <i>three line of defense</i>, serta senantiasa mengedepankan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dan memperhatikan ketentuan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM).</p> | |
| 2. | <p>a. Dalam perhatian kami, terdapat peningkatan pencadangan rugi penurunan nilai aset keuangan. Apakah ini disebabkan oleh kenaikan NPL akibat ketidakmampuan BTN membayar hutang kredit</p> | <p>Di tahun 2023, Perseroan mengalami penurunan NPL gross yaitu dari 3,38% menjadi 3,01%. Terkait dengan adanya peningkatan pencadangan CKPN untuk NPL</p> |

| No | Tanggapan/Pertanyaan | Jawaban |
|----|---|---|
| | <p>rumah, kredit motor, kredit tanpa agunan atau kartu kredit?</p> <p>b. Baru-baru ini PT Akulaku Finance Indonesia berhasil mendapatkan pencabutan sanksi oleh OJK. Apakah hal tersebut memberikan dampak pada industri perbankan, terutama BTN mengingat Perusahaan <i>Buy Now Pay Later</i> (BNPL) memiliki CAGR >10% per tahun?</p> | <p>di tahun 2023 yaitu mencapai 155,16%, adalah bertujuan untuk meningkatkan kehati-hatian Perseroan terhadap risiko NPL dan meningkatkan <i>coverage</i> Perseroan.</p> <p>Perseroan memiliki konsentrasi bisnis yang berbeda dengan PT Akulaku Finance Indonesia. Sampai dengan saat ini, Perseroan belum memiliki irisan persaingan dengan PT Akulaku. Namun ke depannya, Perseroan merencanakan akan mengeluarkan produk BNPL yang diharapkan akan keluar izinnya dari OJK tahun ini.</p> |
| 3. | <p>a. Divisi bisnis manakah yang menjadi gangguan dalam meningkatkan laba Perseroan dan solusi apa yang manajemen lakukan untuk memperbaikinya?</p> <p>b. Sebagai raja KPR rumah subsidi, adakah agenda Perseroan untuk menciptakan layanan KPR flat cicilan s.d. 30 tahun, dan apakah hal tersebut akan mengganggu NPL seandainya nasabah wanprestasi karena pensiun atau PHK?</p> | <p>Pada dasarnya, seluruh Divisi telah berkontribusi dengan baik, sehingga tidak ada Divisi bisnis yang menjadi gangguan dalam meningkatkan laba. Hal tersebut tercermin dari kinerja Perseroan di tahun 2023 yang secara umum mencatat hasil yang baik, antara lain aset meningkat, pertumbuhan kredit dan DPK meningkat, LAR dan rasio keuangan lainnya tercatat baik, pencadangan CKPN meningkat, laba meningkat dan menjadi pencapaian terbesar sepanjang Perseroan berdiri.</p> <p>Skema KPR dengan perhitungan bunga flat mungkin dapat dilakukan Perseroan, namun skema tersebut akan sangat membebani konsumen terutama apabila diterapkan pada KPR dengan jangka waktu panjang s.d. 30 tahun. Bunga yang dibayarkan konsumen akan lebih tinggi dari pokok kreditnya, dikarenakan bunga dengan skema flat akan lebih tinggi dibandingkan bunga dengan skema anuitas atau efektif yang merupakan skema perhitungan bunga KPR yang umum dipakai oleh pasar. atas hal tersebut, maka untuk saat ini Perseroan tidak akan menggunakan skema tersebut.</p> |
| 4. | <p>Melalui dana CSR, BTN diharapkan dapat berperan aktif dalam membangun mentalitas anak bangsa khususnya Gen Z yang saat ini di tengarai sebagai generasi stroberi (Kompas.id, 26 Juni 2023). Mereka dipandang sebagai generasi muda yang lembek, manja, berdaya juang lemah saat menghadapi tantangan, padahal merekalah generasi yang berperan penting untuk meraih Indonesia Emas 2045. Salah satu cara membangun generasi z agar mereka memiliki mental tangguh, punya daya juang yang tinggi dan berjiwa patriotik & rasa nasionalisme yang tinggi, perlu dibagikan secara gratis buku-buku biografi pahlawan nasional. Dengan demikian jiwa nasionalisme, daya juang yang tinggi diharapkan dapat menular kepada gen z yang membaca buku-buku pahlawan tersebut.</p> | <p>Hal tersebut akan menjadi masukan bagi Perseroan.</p> |

Hasil Penghitungan Suara

| Setuju | Tidak Setuju | Abstain |
|------------------------------|------------------|--------------------------|
| 10.767.960.536 (96,2067051%) | 200 (0,0000018%) | 424.565.315 (3,7932931%) |

Keputusan

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
 2. Mengesahkan:
 - a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan Ernst & Young Global) sesuai Laporan Nomor 00048/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 dengan opini wajar dalam semua hal yang material; dan
 - b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan Ernst & Young Global) sesuai Laporan Nomor 00047/2.1032/AU.2/10/1681-1/1/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.
 3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), seluruhnya untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan-laporan tersebut di atas.
- 2. Mata Acara Kedua Rapat**
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

Pertanyaan, Pendapat, dan/atau Usul

Tidak terdapat pertanyaan, pendapat, dan/atau usul yang diajukan dalam pembahasan mata acara kedua Rapat.

Hasil Penghitungan Suara

| Setuju | Tidak Setuju | Abstain |
|------------------------------|------------------|--------------------------|
| 10.818.441.493 (96,6577290%) | 200 (0,0000018%) | 374.084.358 (3,3422693%) |

Keputusan

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 sebesar Rp3.500.987.620.258,75 (tiga triliun lima ratus miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh delapan koma tujuh lima rupiah) sebagai berikut:

1. Sebesar 20% (dua puluh persen) atau sejumlah Rp700.197.524.051,75 (tujuh ratus miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu lima puluh satu koma tujuh lima rupiah) atau sebesar Rp49,89136 (empat puluh sembilan koma delapan sembilan satu

tiga enam rupiah) per saham ditetapkan sebagai Dividen Tunai. Pembayaranannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dividen bagian Negara Republik Indonesia sebesar Rp420.118.514.441,03 (empat ratus dua puluh miliar seratus delapan belas juta lima ratus empat belas ribu empat ratus empat puluh satu koma nol tiga rupiah) disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
 - b. Dividen untuk Tahun Buku 2023 dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (*recording date*).
 - c. Direksi diberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan:
 - i. Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2023 sesuai ketentuan yang berlaku.
 - ii. Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
 - iii. Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sebesar 80% (delapan puluh persen) atau sejumlah Rp2.800.790.096.207,00 (dua triliun delapan ratus miliar tujuh ratus sembilan puluh juta sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) digunakan sebagai saldo laba ditahan.

3. Mata Acara Ketiga Rapat

Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2024, serta Tantiem atas Kinerja Tahun 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Pertanyaan, Pendapat, dan/atau Usul

Tidak terdapat pertanyaan, pendapat, dan/atau usul yang diajukan dalam pembahasan mata acara ketiga Rapat.

Hasil Penghitungan Suara

| Setuju | Tidak Setuju | Abstain |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 10.469.506.271 (93,5401555%) | 348.930.722 (3,1175333%) | 374.089.058 (3,3423113%) |

Keputusan

1. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris:
 - a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2023 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun Buku 2024.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Direksi:
 - a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2023 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Gaji, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun Buku 2024.

4. Mata Acara Keempat Rapat

Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024.

Pertanyaan, Pendapat, dan /atau Usul

Tidak terdapat pertanyaan, pendapat, dan/atau usul yang diajukan dalam pembahasan mata acara keempat Rapat.

Hasil Penghitungan Suara

| Setuju | Tidak Setuju | Abstain |
|------------------------------|------------------|--------------------------|
| 10.818.441.493 (96,6577290%) | 200 (0,0000018%) | 374.084.358 (3,3422693%) |

Keputusan

1. Menyetujui penunjukan Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan Ernst & Young Global), sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta laporan lainnya untuk Tahun Buku 2024.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan:
 - a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2024 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan
 - b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan Ernst & Young Global), karena sebab apa pun, tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2024, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

5. Mata Acara Kelima Rapat

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II).

Pertanyaan, Pendapat, dan/atau Usul

Mata acara Rapat kelima bersifat laporan sehingga tidak dilakukan sesi tanya jawab.

Hasil Penghitungan Suara

Mata acara Kelima Rapat bersifat laporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.

6. Mata Acara Keenam Rapat

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Pertanyaan, Pendapat, dan /atau Usul

Tidak terdapat pertanyaan, pendapat, dan/atau usul yang diajukan dalam pembahasan mata acara keenam Rapat.

Hasil Penghitungan Suara dan Keputusan Mata Acara keenam Rapat

| Setuju | Tidak Setuju | Abstain |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 10.128.364.939 (90,4922168%) | 690.076.754 (6,1655139%) | 374.084.358 (3,3422693%) |

Keputusan

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan:
 - a. Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;

- b. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN;
 - c. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN; dan
 - d. peraturan terkait lainnya.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut di atas
 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris, menyesuaikan perubahan Anggaran Dasar Perseroan jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

7. Mata Acara Ketujuh Rapat

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Pertanyaan, Pendapat, dan/atau Usul

Tidak terdapat pertanyaan, pendapat, dan/atau usul yang diajukan dalam pembahasan mata acara ketujuh Rapat.

Hasil Penghitungan Suara

| Setuju | Tidak Setuju | Abstain |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 10.430.252.214 (93,1894388%) | 388.189.479 (3,4682919%) | 374.084.358 (3,3422693%) |

Keputusan

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan:
 - 1) Sdr. Ahdi Jumhari Luddin – sebagai Komisaris Independen;
 - 2) Sdr. Mohamad Yusuf Permana – sebagai Komisaris;

yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPSLB Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 dan Keputusan RUPSLB Tahun 2023 tanggal 11 Januari 2023, masing-masing terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2023 dan 4 Maret 2024, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - 1) Sdr. Elisabeth Novie Riswanti – sebagai Direktur Assets Management;
 - 2) Sdr. Hirwandi Gafar – sebagai Direktur Consumer;
 - 3) Sdr. Jasmin – sebagai Direktur Distribution and Funding;
 - 4) Sdr. Setiyo Wibowo – sebagai Direktur Risk Management;
 - 5) Sdr. Chandra M. Hamzah – sebagai Komisaris Utama/Independen;
 - 6) Sdr. Andin Hadiyanto – sebagai Komisaris;
 - 7) Sdr. Armand B. Arief – sebagai Komisaris Independen;

yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPSLB Tahun 2019 tanggal 29 Agustus 2019 jo RUPSLB Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 jo RUPS Tahun Buku 2020 tanggal 10 Maret 2021 jo RUPS Tahun Buku 2021 tanggal 2 Maret 2022, Keputusan RUPSLB Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 jo RUPS tahun Buku 2021 tanggal 2 Maret 2022,

Keputusan RUPSLB Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 jo RUPS Tahun Buku 2020 tanggal 10 Maret 2021 jo RUPS Tahun Buku 2021 tanggal 2 Maret 2022, Keputusan RUPSLB Tahun 2019 tanggal 27 November 2019, Keputusan RUPS Tahun Buku 2020 tanggal 10 Maret 2021, dan Keputusan RUPSLB Tahun 2019 tanggal 27 November 2019, terhitung sejak ditutupnya RUPS, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.

3. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

| No | Semula | Menjadi |
|----|-----------------------------------|---|
| 1) | Direktur Distribution and Funding | Direktur Distribution and Institutional Funding |
| 2) | Direktur IT and Digital | Direktur Information Technology |
| 3) | Direktur Institutional Banking | Direktur Operations and Customer Experience |
| 4) | - | Direktur SME and Retail Funding |

4. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan:

| No | Nama | Semula | Menjadi |
|----|----------------------|--------------------------------|---|
| 1) | Sdr. Andi Nirwoto | Direktur IT and Digital | Direktur Information Technology |
| 2) | Sdr. Hakim Putratama | Direktur Institutional Banking | Direktur Operations and Customer Experience |

yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPSLB Tahun 2023 tanggal 11 Januari 2023 dan Keputusan RUPS Tahun Buku 2022 tanggal 16 Maret 2023, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan berdasarkan RUPS tersebut.

5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

- 1) Sdr. Elisabeth Novie Riswanti – sebagai Direktur Assets Management;
- 2) Sdr. Hirwandi Gafar – sebagai Direktur Consumer;
- 3) Sdr. Jasmin – sebagai Direktur Distribution and Institutional Funding;
- 4) Sdr. Setiyo Wibowo – sebagai Direktur Risk Management;
- 5) Sdr. Muhammad Iqbal – sebagai Direktur SME and Retail Funding;
- 6) Sdr Chandra M. Hamzah – sebagai Komisaris Utama/Independen;
- 7) Sdr. Bambang Widjanarko – sebagai Komisaris Independen;
- 8) Sdr. Armand B. Arief – sebagai Komisaris Independen;
- 9) Sdr. Adi Sulistyowati – sebagai Komisaris Independen;
- 10) Sdr. Andin Hadiyanto – sebagai Komisaris;

6. Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

7. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

a. Direksi

- 1) Direktur Utama

: Nixon L.P. Napitupulu

- | | |
|--|----------------------------|
| 2) Wakil Direktur Utama | : Oni Febriarto Rahardjo |
| 3) Direktur Finance | : Nofry Rony Poetra |
| 4) Direktur Assets Management | : Elisabeth Novie Riswanti |
| 5) Direktur Human Capital, Compliance, and Legal | : Eko Waluyo |
| 6) Direktur Risk Management | : Setiyo Wibowo |
| 7) Direktur Distribution and Institutional Funding | : Jasmin |
| 8) Direktur Information Technology | : Andi Nirwoto |
| 9) Direktur Consumer | : Hirwandi Gafar |
| 10) Direktur Operations and Customer Experience | : Hakim Putratama |
| 11) Direktur SME and Retail Funding | : Muhammad Iqbal |

b. Dewan Komisaris

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1) Komisaris Utama/Independen | : Chandra M. Hamzah |
| 2) Wakil Komisaris Utama/Independen | : Iqbal Latanro |
| 3) Komisaris Independen | : Bambang Widjanarko |
| 4) Komisaris Independen | : Armand B. Arief |
| 5) Komisaris Independen | : Sentot A. Sentausa |
| 6) Komisaris Independen | : Adi Sulistyowati |
| 7) Komisaris | : Andin Hadiyanto |
| 8) Komisaris | : Herry Trisaputra Zuna |
| 9) Komisaris | : Himawan Arief Sugoto |

8. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 butir 5), 7), dan 9) baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh OJK, maka anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil *Fit and Proper Test* OJK dimaksud.
9. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
10. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) atas anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 butir 5), 7), dan 9).
11. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

Sesuai dengan keputusan mata acara Rapat kedua sebagaimana tersebut di atas, di mana Rapat telah menetapkan Dividen Tunai tahun buku 2023 sebesar Rp700.197.524.051,75,- (tujuh ratus miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu lima puluh satu koma tujuh lima rupiah) atau sebesar Rp49,89136 (empat puluh sembilan koma delapan sembilan satu tiga enam rupiah) per lembar saham yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2023 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

| NO | KETERANGAN | TANGGAL |
|----|--|--------------------------------|
| 1 | Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> ● Pasar Reguler dan Negosiasi ● Pasar Tunai | 18 Maret 2024 20 Maret 2024 |
| 2 | Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> ● Pasar Reguler dan Negosiasi ● Pasar Tunai | 19 Maret 2024 21 Maret 2024 |
| 3 | Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Recording Date</i>) | 20 Maret 2024 |
| 4 | Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2023 | 5 April 2024 |

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau *recording date* pada tanggal 20 Maret 2024 dan/atau pemilik Saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 20 Maret 2024.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 5 April 2024 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran Dividen Tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham Perseroan.
- Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, Dividen Tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas Dividen Tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen Tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPH”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

5. Pemegang Saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen dimaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-25/Pj/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 7 Maret 2024

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
DIREKSI